PEREMPUAN DALAM PARTISIPASI POLITIK DI INDONESIA

Eza Tri Yandy, Muhammad Mustajab
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
e-Mail: ezatriyandy@uinjambi.ac.id

Abstract

Politik is a way to achieve power constitutionally and non constitutionally and in the process of achieving, regulation are a reference for every Indonesian citizen who wants to participate in it. General election, regional head election, which is familiarly known as general election and local election, is a space for filling certain political positions freely or publicly, which is opened as wide as possible for the public, social and political inequality that often becomes a problem for women's existence should no longer occur because justice is the right of all citizens in accordance with the mandate of the 1945 constitution article 28 H verse 2. With the laws which is applicable in Indonesia, it is a breath of fresh air for women's struggles, the application of affirmative action with the zipper system method has a positive impact on increasing the existence of women in politics. The existence of women shows positive results as seen from the percentage of women from the election results in 1999 to 2009, in the 2004 and 2009 elections there was an increase in the representation of women in the legislature of the Republic Indonesia because at that time Law Number 12 of 2003 was issued regarding the elections for DPR, DPD and DPRD and reinforced by law number 10 of 2008 article 55 verse 2, only it decreased slightly in the 2014 election and again increased in the 2019 election. The development of the existence of women in politics in Indonesia continues to develop from time to time, this is the impact of the rules or regulations that are made, it is concluded that legal and binding rules are an important indicator for women's groups, the only thing left is the women must maximize available opportunities. From the analysis carried out, the author suggests that the leaders of parties and institutions administering the general election must determine policies and political structures with applicable standardization.

Keywords: Representation of women; State; Politik.

Pendahuluan

Politik adalah cara untuk mencapai kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional dan dalam proses pencapaiannya regulasi merupakan acuan bagi setiap Warga Negara Indonesia yang ingin ikut serta berpartisipasi di dalamnya. Politik merupakan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintahan dalam merumuskan kebijakan, aturan dan keputusan (Lutfi dan Satriawan, 2015) kemudian diperuntukkan untuk kebaikan masyarakat, serta sebagai sarana mengatur individu dan kelompok masyarakat terhadap pemerintahan serta sebaliknya agar tercapai tujuan bersama suatu negara. Sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta

melaksanakan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan hubungan negara dengan negara (Anggara, 2013). Setiap warga negara memiliki kesempatan dan hak politik yang sama dalam pemerintahan selagi hal tersebut sesuai dengan mekanisme, prosedur dan aturan yang berlaku, *quality before the law* semua orang sama di mata hukum.

Pemilihan umum, pemilihan kepala daerah yang akrab dikenal dengan Pemilu dan Pemilukada, merupakan ruang pengisian jabatan politik tertentu secara bebas/umum di buka seluas-luasnya bagi masyarakat, mulai dari Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif yang bertujuan melahirkan pemimpin/pimpinan yang merupakan keinginan dari rakyat itu sendiri sebagai perwujudan realisasi sistem demokrasi di Indonesia. Proses pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah belakangan ini sangat menarik karena eksistensi perempuan semakin diperhitungkan dalam persaingan politik di Indonesia (Widiyaninggrum, 2020). Kondisi ini menggambarkan bahwa melalui eksistensinya, perempuan dapat ikutserta menguatkan posisinya dalam ketata negaraan Indonesia. Dari pengamatan penulis, pemberdayaan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan seharusnya mampu diterima secara terbuka oleh semua pihak sehingga perempuan dapat bermitra dengan siapapun terutama dalam bidang politik, mengingat kondisi perempuan yang kerap kali terdiskriminasi dan kedudukannya dianggap lebih bawah dari laki-laki. Kesenjangan sosial dan politik yang sering kali menjadi persoalan bagi eksistensi perempuan seharusnya tidak lagi terjadi karena keadilan merupakan semua hak warga negara sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 2 "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan" UUD 1945 menjadi dasar fundamental setiap warga negara untuk berpartisipasi dan terlibat pada setiap urusan kenegaraan dari berbagai aspek kehidupan tanpa harus adanya diskriminasi terhadap golongan perempuan.

Emansipasi wanita atau kesetaraan gender belakangan ini telah menjadi perbincangan menarik, terlihat dari beberapa diskusi, dialog atau seminar yang kerap mengusung tema mengenai gender. Pembicaraan tersebut beriringan dengan perkembangan politik di Indonesia (Gusmansyah, 2019), maka kesadaran untuk membincang relasi gender di dalam kehidupan masyarakat menjadi semakin mengedepan. Perbincangan mengenai gender kemudian menjelma menjadi kekuatan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kekuatan tersebut menjadi sumber motivasi bagi perempuan dalam mempertahankan eksistensinya terkhusus pada bidang politik walaupun pada kenyataannya secara kuantitatif laki-laki lebih mendominasi perpolitikan Indonesia dibandingkan perempuan.

Gerakan gender pada akhirnya secara berangsur membuahkan hasil yang positif dalam bidang politik, terlihat dari semakin meningkatnya keterlibatan perempuan dalam mengisi ruang-ruang strategis di Indonesia mulai dari tataran legislatif, eksekutif, yudikatif dan jabatan politik lainnya. Meningkatnya eksistensi perempuan dalam bidang politik salah satunya dilatar belakangi oleh keseriusan negara/pemerintah dengan dirumuskannya Undang-undang tentang partai politik sebagai bentuk kepedulian memperjuangkan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki yang selalu digaungkan. Menguatnya peranan perempuan dalam perpolitikan di Indonesia diiringi dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

partai politik dalam pasal 2 ayat 2 disebutkan mengenai ketentuan kuota perempuan dalam pembentukan partai politik “Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”. Ketentuan keterwakilan perempuan sebanyak 30% merupakan regulasi yang secara yuridis telah mengikat para petugas partai politik agar dapat di penuhi guna mendukung eksistensi perempuan di bidang politik. Keharusan 30% kuota perempuan jangan sampai hanya dijadikan prasyarat semata akan tetapi para petugas partai politik harus menyiapkan/memberikan komposisi strategis sehingga hal tersebut menjadi ruang gerak bagi perempuan untuk meningkatkan eksistensinya agar leluasa dalam memperkuat posisi perempuan di Indonesia.

Pembahasan mengenai kesetaraan gender seolah tak ada habisnya senada dengan misi ajaran Islam yaitu itu membantu umat manusia keluar dari kesengsaraan dan ketidakadilan. Islam sangat menekankan keadilan dari berbagai aspek kehidupan, namun hal demikian tidak akan tercapai tanpa adanya perjuangan dan pengorbanan, (Abdullah, 2009) bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk berjuang memperjuangkan masyarakat lemah dan tertindas. Kesetaraan gender juga menjadi salah satu perhatian pada periode kepemimpinan Rasulullah SAW di dalam Islam (Hasanah, Musyafak, 2017) mengingat pada masa jahiliyah perempuan sering kali mendapatkan perlakuan yang merugikan oleh golongan laki-laki mulai dari pemerkosaan, pemberian beban kerja yang berlebihan, dan menjadi korban kekerasan nafsu para laki-laki pada masa itu. Kehadiran sosok Rasulullah SAW yang revolusioner sangat dirasakan perubahannya bagi setiap kehidupan terkhusus bagi kelompok perempuan, pada periode Rasulullah SAW perempuan tidak lagi dipandang sebagai *the second class* tetapi memiliki hak, derajat, serta eksistensi yang sama, karena Islam mengedepankan konsep keadilan bagi siapa saja dan untuk siapa saja dengan tidak membedakan jenis kelamin.

Islam merupakan agama yang damai persoalan perempuan/kesetaraan gender sendiri sebenarnya sudah ada secara tekstual di dalam Al-Quran hal itu menunjukkan bahwa agama yang di nahkodai Rasulullah SAW bukan agama yang patriarki seperti disebutkan pada surat Al-An’am 165 “dan dia yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya tuhanmu amat cepat siksa-Nya dan sesungguhnya tuhan maha pengampun dan maha penyayang”. Kata “khalifah” yang dimaksud tidak tertuju atas perempuan atau laki-laki dan kelompok tertentu (Suhra, 2013), artinya semua memiliki fungsi dan kemungkinan menjadi khalifah yang akan bertanggung jawab akan tugasnya. Pada surat lain juga dibunyikan “wahai manusia sesungguhnya, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang paling bertakwa. sungguh Allah maha mengetahui dan maha teliti” (Qs. Al-Hujurat 13). Dari kedua arti ayat di atas maka jelas sebenarnya Islam sudah lebih dulu membicarakan mengenai persamaan hak atau kesetaraan gender hanya saja secara legal belum terlalu di diperkuat/direalisasikan dengan maksimal.

Melihat fenomena belakangan ini banyak sekali persoalan atau kasus yang berdampak terhadap kehidupan perempuan sebagai, mulai dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelecehan, pemerkosaan dan lain-lain. Namun problem-problem yang merugikan perempuan akan mampu diatasi jika eksistensi perempuan

dalam politik selalu ditingkatkan karena melalui peranan perempuan di jajaran ketata negaraan Indonesia, perempuan dapat terlibat menyuarakan serta memutuskan kebijakan yang pro atas keberlangsungan hidup perempuan. Konstruksi pemikiran mengenai gender di kalangan masyarakat harus selalu menguat terlebih lagi dalam bidang politik seiring dengan amanat Undang-undang Dasar dan Undang-undang yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya agar segala ketentuan di dalam UUD dan UU tersebut dapat di implementasikan secara maksimal.

Kepedulian mengenai kesetaraan gender sebenarnya terus menjadi perhatian negara, terlihat pada Undang-undang Nomor 68 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan yang telah lama disahkan, dalam pasal 1, 2 dan 3 dibunyikan bahwa wanita akan mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan pria, tanpa suatu diskriminasi. Kemudian wanita dapat dipilih untuk pemilihan dalam semua badan-badan pemilihan umum, yang didirikan oleh hukum nasional dengan syarat-syarat sama dengan pria, tanpa ada diskriminasi. Lalu disebutkan wanita akan mempunyai hak untuk menjabat jabatan umum dan menjalankan semua tugas-tugas umum yang didirikan oleh hukum nasional, dengan syarat sama tanpa ada diskriminasi. Hal tersebut menunjukkan posisi perempuan dan laki-laki dalam konteks politik dan pemerintahan adalah sama. Berangkat dari permasalahan mengenai kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam konteks politik maka penulis tertarik untuk meneliti perihal terkait eksistensi perempuan dalam politik di Indonesia dan melihat Implikasi undang-undang politik dan pemilu terhadap eksistensi perempuan dalam politik di Indonesia.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap literatur tentang permasalahan, lalu menguraikan seluruh masalah yang ada secara eksplisit. Hasil penelitian dilakukan secara deduktif yakni menarik suatu simpulan dari uraian tersebut yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Eksistensi Perempuan dalam Politik di Indonesia

Secara historis pada masa perjuangan dalam melawan penjajahan kolonial peranan perempuan juga patut diakui, karena pada saat itu selain berada pada garis perjuangan, perempuan juga memerankan diri sebagai ibu dan isteri dalam rumah tangga. Pasca Indonesia merdeka, komponen kekuasaan pada negara juga berpengaruh antara hubungan laki-laki dan perempuan. Kelompok perempuan berusaha mempertahankan eksistensinya dalam ruang politik karena pada masa itu bukan lagi berfikir untuk terbebas dari penjajahan melainkan mempertahankan peranan perempuan yang harus mampu bersaing dengan laki-laki, yang saat itu masih mendominasi perpolitikan Indonesia (Amaliatulwalidain dan Kencana, 2019). Setelah kemerdekaan, gerakan perempuan mengalami perkembangan namun beriringan dengan itu perbedaan ideologi pula semakin dirasakan, terlebih lagi bermunculan sayap-sayap partai politik yang melibatkan perempuan yang pada umumnya dipimpin oleh laki-laki menjelang Pemilu 1955, ditambah lagi dengan gerakan perempuan yang

lebih memilih bergabung bersama partai politik dari pada gerakan perempuan yang ada. Dalam pemilihan umum pada tahun 1955 hak-hak perempuan perlahan diakui hak dimaksud adalah hak untuk memilih dan hak untuk duduk sebagai anggota parlemen, lalu tak berselang lama perempuan kembali mendapatkan angin segar mengenai kesetaraan gender terbukti pada masa itu disahkannya Undang-undang 80 tahun 1958 yang didalamnya menentukan prinsip pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama antara perempuan dan laki-laki. Maka jelas dengan keluarnya Undang-undang tersebut merupakan contoh dan bukti dari hasil perjuangan kaum perempuan dalam perpolitikan di Indonesia.

Setelah terjadinya pergantian kepemimpinan ke masa orde baru prihal kebijakan politik perempuan menjadi target penting oleh seluruh lembaga negara. Kebijakan politik perempuan dan ekonomi mengarah pada pembangunan sebagai gambaran kebijakan pada orde lama lebih kepada pembangunan ideologi dan politik. Perempuan diposisikan sebagai rekan kerja dalam melakukan pembangunan, dengan kata lain keberadaan perempuan mulai mulai dianggap penting dalam pemerintahan serta pembangunan nasional, (Margono, 2012) hal tersebut diiringi dengan dietapkannya GBHN Tahun 1998 bahwa perempuan memiliki hak, kewajiban, kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan. Kepemimpinan Soeharto pada masa orde baru melahirkan fondasi fundamental dengan mendelegitimasi peranan perempuan dalam agenda-agenda politik pada masa itu.

Kontruksi ideologi mengenai gender dilatarbelakangi oleh sebuah paham Ibuisme yang berkembang pada masa itu, paham yang menempatkan kaum perempuan sebagai pekerja tanpa harus dibayar demi mendukung kapitalisme negara, sehingga eksistensi perempuan menjadi terbatas dan peranan perempuan dalam politik menjadi hal yang dianggap tidak layak. (Fathurrosi, 2018) Politik gender di aktualisasikan melalui dokumen milik negara antara lain GBHN, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan panca Dharma wanita, kemudian disebutkan juga pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, pasal 7 menjelaskan mengenai hak-hak politik perempuan, yaitu negara beserta konvensi wajib membuat peraturan tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan kermasyarakatan negaranya. Upaya penguatan politik perempuan pada masa orde baru telah menginventarisasi segala bentuk organisasi keperempuanana untuk membantu urusan pemerintahan dan terlibat dalam menyebarkan ideologi gender. Organisasi perempuan pada saat itu adalah Dharma Wanita sebagai wadah untuk para isteri Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dharma Pratiwi untuk isteri yang suaminya bekerja di Militer dan kepolisian, dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada tingkat pedesaan.

Perjuangan perempuan yang terus dimasifkan semakin menemukan titik terang, terbukti pada masa orde baru dibawah pimpinan soeharto selaku presiden kedua Republik Indonesia perempuan terlibat dalam urusan pemerintahan serta sebagai partner pemerintah dalam menjalankan tugas kenegaraan, pada masa itu juga beberapa konvensi mengenai keadilan gender disahkan melalui Undang-undang, kemudian organisasi perempuan terbentuk sebagai wadah memberikan akses dan kesempatan yang sama, baik terhadap perempuan maupun laki-laki untuk memegang posisi strategis bahkan *top position* dengan mengedepankan kualitas masing-masing individu.

Berakhirnya orde baru ke era reformasi melalui perubahan secara drastis yang bertujuan melakukan perbaikan di bidang sosial, politik agama dan ekonomi. Namun pada kenyataannya sisa-sisa orde baru menyisahkan pertanyaan terhadap posisi perempuan dalam politik di Indonesia, terlihat pada pemilu 1999 lemahnya posisi tawar bagi perempuan karena pada masa itu munculnya wacana perempuan sebagai calon presiden. Pada saat itu politisi Islam berargumen bahwa dalam agama perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin hal tersebut sebagai upaya pencegahan megawati selaku ketua PDIP yang ingin mencalonkan diri (Darwin, 2004). Setelah Gusdur dilengserkan, para politisi Islam berbalik mendukung Megawati yang sebelumnya telah mengeluarkan statement bahwa di dalam Islam perempuan tidak layak memimpin kemudian berbalik meng-*counter* pernyataan tersebut dengan memberikan argumen “Dhorurot” (kedaruratan) yang berarti bahwa pada saat dibutuhkan komposisi perempuan dapat dipersoalkan kembali. Melihat dari pernyataan di atas konsistensi gerakan politik perempuan harus tetap digaungkan sehingga stigma yang keliru di tengah masyarakat mengenai peran perempuan hanya sebagai seorang ibu dan isteri saja yang mengurus rumah tangga, akan tetapi perempuan juga layak berperan di dalam politik, namun untuk menjawab itu semua kepada masyarakat, kelompok perempuan harus mengedepankan ide, gagasan serta pengetahuan dalam meningkatkan eksistensinya sehingga posisi perempuan tidak hanya dijadikan alternatif atau hanya pelengkap saja di dalam politik.

Eksistensi perempuan yang terus diperjuangkan dan sampai akhirnya dapat diterima dalam ruang politik memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan untuk ikut serta terlibat dalam merumuskan/memutuskan undang-undang dan peraturan lain yang bersifat legal, kemudian mampu menyuarakan jika produk hukum/aturan dipandang merugikan keberlangsungan eksistensi perempuan dalam politik. Bukankah secara tegas termaktub pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dalam pasal 2 ayat 2 disebutkan mengenai ketentuan kuota perempuan dalam pembentukan partai politik “Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% keterwakilan perempuan”. Revisi atau perubahan yang berlangsung pada tataran undang-undang ini memberi landasan ideal yang memiliki kekuatan hukum di mata negara dan dianggap oleh kelompok perempuan akan mendorong menuju perubahan pada tataran praktis. Bagaimanapun juga Indonesia sebagai Negara hukum maka tentu segala tindakan, perilaku dan keputusan apapun harus berdasarkan kepada hukum sebagai instrumennya karena kekuatan hukum akan mempermudah perubahan dalam tatanan negara dan masyarakat.

Peran Perempuan Menuju Perubahan

Eksistensi perempuan di dalam politik sebenarnya sudah diperkuat berbagai aturan atau peraturan yang sudah di legalkan negara, hanya saja kelompok perempuan harus memaksimalkan kesempatan dan peluang yang ada khususnya dalam konteks perpolitikan di Indonesia, kesempatan yang dimaksud adalah kuota 30% seperti yang tertuang dalam UU Partai Politik, tanpa disadari melalui kebijakan tersebut perempuan sudah difasilitasi/dijaminan oleh negara untuk berperan aktif dan memberikan kontribusi bagi masyarakat melalui partai politik beriringan dengan pembuktian kepada masyarakat bahwa perempuan juga bisa dan mampu mewarnai perpolitikan

yang ada (Lutfi dan Satriawan, 2015). Karena partai politik merupakan bagian dari elemen-elemen penting demokrasi di Indonesia maka keterlibatan perempuan dalam partai politik akan berfungsi sebagai, antara lain:

1. Sarana Komunikasi Politik

Dengan terpenuhinya komposisi kuota perempuan pada partai politik memberikan ruang bagi perempuan dalam merumuskan kepentingan Interest articulation kemudian mensublimasi kepentingan Interest aggregation masyarakat khususnya kelompok perempuan agar dapat diperjuangkan melalui kesempatan yang ada. Melalui fungsi ini posisi perempuan menjadi lebih diperhitungkan karena keikutsertaannya di dalam partai politik, sehingga apapun yang dikomunikasikan oleh perempuan tidak dipandang sebelah mata karena merupakan representasi dari partai politik.

2. Sarana Sosialisasi Politik

Melalui proses sosialisasi politik dapat meningkatkan eksistensi perempuan hal demikian dikarenakan perempuan mampu hadir ditegah masyarakat dalam memberikan pemahaman terkait kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah selain itu perempuan lebih leluasa memberikan pencerahan terhadap kelompok perempuan lainnya yang masih menganggap wajah politik selalu berparas maskulin.

3. Sarana Rekrutmen Politik

Keterwakilan perempuan dalam partai politik harus di manfaatkan secara maksimal karena melalui itu perempuan mampu memperbesar eksistensinya di bidang politik dengan melakukan rekrutmen politik secara terstruktur, rekrutmen yang dimaksud upaya menjamin kontinuitas peranan perempuan pada partai politik selain itu perempuan dapat menentukan calon anggota partai politik yang memang memiliki kompetensi, pengetahuan, kredibel dan yang paling penting adalah tidak memiliki pemikiran patriarki.

4. Sarana Pengatur Konflik

Indonesia yang merupakan negara demokrasi didalamnya terdiri dari berbagai suku, golongan, ras dan agama maka tentu peluang konflik selalu berdampingan, dalam menjalankan fungsi sebagai pengatur konflik, maka partai politik harus peka terhadap tuntutan kebuthan rakyat, untuk mewujudkan hal tersebut peranan perempuan sangat dibutuhkan karena secara psikologis sosok perempuan lebih sensitif dan peka dengan keadaan.

5. Pembuat Kebijakan

Seperti diketahui partai politik merupakan sarana bagi para politisi ataupun setiap orang yang memiliki keinginan menduduki posisi strategis di Indonesia eksekutif maupun legislatif melalui kekuasaan itu kemudian partai politik dapat ikut serta memberikan arahan dan saran apabila kebijakan yang akan diambil bernuansa diskriminasi atau merugikan masyarakat.

Demi menghilangkan anggapan yang salah dari masyarakat mengenai keterlibatan perempuan dalam politik tentunya eksistensi perempuan harus selalu ditingkatkan kemudian memaksimalkan fungsinya di dalam partai politik agar dapat terlibat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat Indonesia serta mampu menjaga kemurnian demokrasi tanpa harus melihat perbedaan antara kelompok perempuan dan laki-laki.

Pengaruh Undang-undang Terhadap Eksistensi Perempuan dalam Politik

Proses politik bagi kelompok perempuan merupakan persoalan yang selama ini dihadapi, hal demikian melihat kondisi saat ini komposisi dari pemerintah, partai politik dan lembaga perwakilan rakyat lebih di dominasi oleh kelompok laki-laki, sehingga mempunyai andil besar untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan. Hegemoni laki-laki menjadi api semangat bagi kelompok perempuan untuk bersaing dalam mengisi ruang strategis di Indonesia dengan menempati posisi strategis perempuan mampu mengakomodir segala bentuk kepentingan perempuan yang kadang tidak begitu diperhatikan agar memberikan perubahan terhadap proses politik ke arah yang lebih demokratis.

Kesetaraan gender atau keadilan antara kaum perempuan dan laki-laki untuk berperan dalam perpolitikan terus menjadi perhatian terlihat dari regulasi yang dibuat oleh negara dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah pada pasal 8 ayat 1 poin d berbunyi “partai politik menjadi peserta pemilu setelah memenuhi syarat menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat” kemudian dilengkapi dalam Pasal 15 Ayat 3 poin d “Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% sesuai dengan peraturan perundang-undangan” lalu kemudian UU ini mempertegas perihal keterwakilan perempuan melalui Pasal 55 Ayat 2 “di dalam daftar bakal calon setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang bakal calon”.

Hadirnya UU tersebut setidaknya menjadi motivasi bagi perempuan untuk berperan di bidang politik walaupun aturan yang ada belum sepenuhnya mengakomodir perempuan dengan ketentuan minimal 30% yang ada namun setidaknya ini peluang bagi perempuan dalam meningkatkan eksistensinya. UU tersebut harus di manfaatkan kelompok perempuan secara efektif karena merujuk kepada aturan tersebut ruang eksistensi perempuan dalam politik bukan hanya pada tataran legislatif melainkan terbuka juga pada level eksekutif, Gubernur, Bupati bahkan ke tingkat peresiden sekalipun. Dalam rangka mendukung keterlibatan perempuan pada bidang politik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia ikut serta mendukung melalui press release Pentingnya Keterwakilan Perempuan di Bidang Politik Siaran Pers Nomor B-086/Set/Rokum/MP01/05/2018 menyebutkan didalamnya dengan meningkatnya representasi perempuan di legislatif akan memberikan keseimbangan dalam mewarnai perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengawasan yang akan lebih berpihak kepada kepentingan kesejahteraan perempuan dan anak.

Kebijakan *affirmative action* terhadap kelompok perempuan di bidang politik bermula dari telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD pemberlakuan itu sebagai upaya meningkatkan keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Berjalannya waktu *affirmative action* mengenai peranan perempuan semakin menunjukkan keberpihakan hal demikian dapat telaah dengan kembalinya diterbitkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang

pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Pengaturan mengenai *affirmative action* agar perempuan dapat semakin berkiprah di lembaga legislatif.

Berbagai tantangan dihadapi dalam menerapkan *affirmative action* bagi kelompok perempuan di Indonesia. Tantangan yang dimaksud ialah budaya dari bangsa kita sendiri yang beranggapan posisi laki-laki lebih tinggi di bandingkan perempuan (patriarki) ditambah lagi dengan persoalan kondisi struktur politik yang masih belum stabil. Sebagai negara berkembang yang memiliki tujuan memajukan kesejahteraan umum maka penting untuk mengakomodasi kelompok terpinggirkan dengan demikian, *affirmative action* menjadi hal yang sangat dibutuhkan (Sayuti, 2013).

Penerapan *zipper system* di dalam politik yang dimaksud adalah menempatkan satu calon legislatif perempuan dari tiga bakal calon yang ditentukan. Dal demikian sudah tertera pada Undang-undang nomor 10 tahun 2008 Pasal 55 Ayat 2 menyebutkan di dalam daftar bakal calon setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan bakal calon bakal calon. Berikut contoh penerapan *zipper system* apabila parpol menetapkan bakal calon legislatif dengan nomor urut 1 sampai 3, maka diantaranya harus menempatkan perempuan sebagai bakal calon, jadi perempuan dapat diposisikan pada nomor urut satu, dua atau tiga dan begitu seterusnya. Lewat penerapan *affirmative action* dengan metode *zipper system* diharapkan mampu meningkatkan eksistensi perempuan dalam bidang politik serta memanfaatkan kuota 30% yang ada secara maksimal. Untuk melihat pengaruh Undang-undang terhadap eksistensi perempuan dalam politik di Indonesia maka peneliti menyajikan presentase keterlibatan perempuan pada pada tabel dibawah, yang disajikan adalah presentase legislatif perempuan di DPR-RI tahun 1999 s/d 2019.

Simpulan

Perkembangan eksistensi perempuan dalam politik di Indonesia terus mengalami perkembangan dari masa ke masa hal demikian merupakan dampak dari aturan/regulasi yang dibuat, maka disimpulkan bahwa aturan yang bersifat legal dan mengikat merupakan indikator penting bagi kelompok perempuan, tinggal lagi golongan perempuan itu sendiri harus memaksimalkan peluang dan kesempatan yang ada. Dari analisis yang dilakukan penulis menyarankan agar para pimpinan partai dan lembaga penyelenggara pemilu agar menentukan kebijakan serta struktur politik dengan standarisasi yang berlaku.

Referensi

- Abdullah, Jihan. (2009). "Kesetaraan Gender dalam Islam." *Jurnal Musawwa*, 1(1).
- Amaliatulwalidain dan Kencana. (2019). "Peranan Politik Gerakan Perempuan Dari Masa ke Masa (Studi:Tentang Sejarah Organisasi Pkk di Indonesia)." *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 4(1): 1-6.
- Darwin. (2004). "Gerakan Perempuan di Indonesia dari Masa ke Masa." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(3): 283-294.
- Gusmansyah. (2019). "Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik di Indonesia." *Jurnal Hawa*, 1(1): 156-172.

- Hasanah dan Musyafak. (2017). "Gender And Politic: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik." *SAWWA*, 12(3): 409-432.
- Mustafa, Kutfi dan Satriawan Iwan. (2015). *Risalah Hukum dan Teori Partai Politik*. Edisi pertama, Cetakan Pertama, Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Margono. (2012). *Pendidikan Pancasila: Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan*, Malang.
- Sahya, Anggara. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. Edisi pertama, Cetakan pertama, Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Sayuti. (2013). "Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)." *Jurnal Menara*, 12(1): 41-47.
- Suhra. (2013). "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Quran dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam." *Jurnal Al-Ulum*, 373-394.
- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 2.
- Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Panca Dharma Wanita.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
- Undang-undang Nomor 68 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik.
- Wahid, Umaimah. (2014). *Risalah Politik Perempuan Media Massa dan Gerakan Counter Hegemony*. Edisi pertama, cetakan pertama, Tangerang Banten: Empat Mata Publishing.
- Wudyaningrum. (2020). "Partisipasi Politik Kader Perempuan dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis." *Jurnal JISIPOL*, 4(2): 126-142